



**PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
PADA PEMILU TAHUN 2019**

Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih

1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

Pemuktahiran daftar pemilih merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Permasalahan daftar pemilih dari pemilu ke pemilu selalu menjadi persoalan klasik dan tak pernah kunjung usai. Problem yang sering kali muncul pada tahapan ini di antaranya adalah petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) tidak melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) atau bisa juga coklit dilakukan oleh oknum lain yang tidak tercantum dalam surat keputusan KPU. Selain itu, petugas pemuktahiran tidak mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan tidak mencatat pemilih yang memenuhi syarat untuk terdaftar di DPT. Disamping itu **Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)** sebagai akses penyusunan data pemilih masih terjadi permasalahan. Jajaran KPU Kabupaten Karanganyar melakukan penyusunan data pemilih harus sesuai dengan ***PKPU Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur tentang syarat terdaftar sebagai pemilih.***

Badan Pengawas Pemilihan Umum Karanganyar juga melakukan hal penting dalam pengawasan pencermatan DPT di setiap tingkatan, yakni pencegahan potensi pemilih ganda dalam data pemilih, pengawasan guna menjamin hak pilih dalam Pemilihan Umum. Sesuai dengan ***Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum*** harus dilaksanakan sesuai ketentuan.

Adanya beberapa status pemilih (DPTHP – DPTb – DPK) menjadi fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Alur pemutakhiran dari data KPU Kabupaten Karanganyar dan Disdukcapil Kabupaten Karanganyar menjadi fokus pengawasan data pemilih sampai ditetapkan menjadi DPT.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

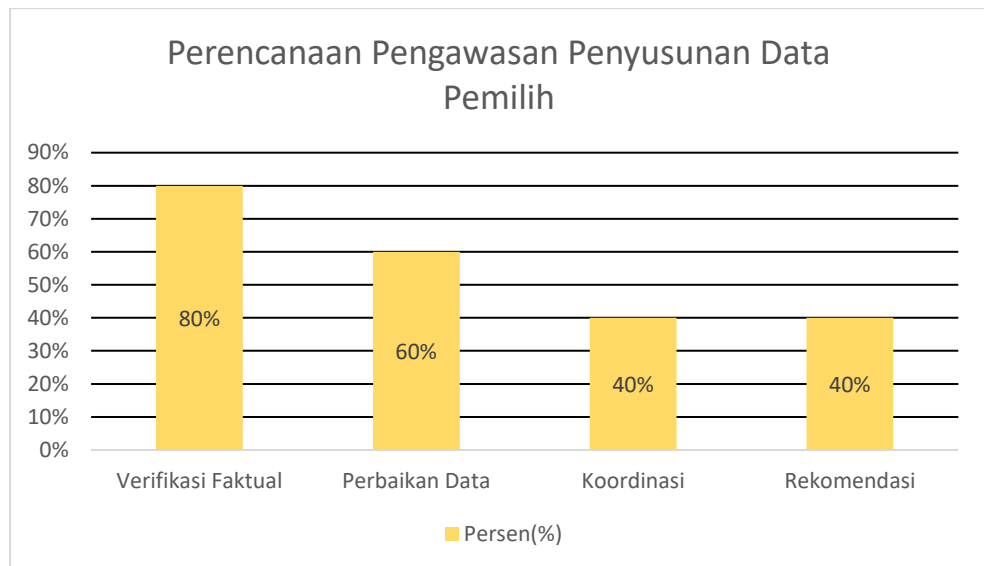
Kerawanan pada tahapan penyusunan data pemilih terurai pada table dibawah ini :

Petugas	Pemilih	Sistem	Laporan
PPDP dalam melakukan pemutakhiran data pemilih lebih cenderung copy paste data di Kelurahan, tidak melakukan cokolit secara faktual	Keberadaan pemilih masih bersifat heterogen dan tidak aktif melihat data pemilih yang diumumkan oleh jajaran KPU	Sistem Data Pemilih (Sidalih) masih terdapat banyak kendala/ kurang maksimal	Laporan secara berjenjang dari tiap tingkatan di jajaran KPU sering tidak sesuai ketika KPU Kabupaten melakukan entry data

b. Perencanaan Pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan melakukan perencanaan terkait :

- Menjaga hak pilih dan masalah data pemilih yang belum akurat, dengan melakukan verifikasi faktual di lapangan.
- Mengawasi kelengkapan elemen pemilih terhadap unsur NIK, nama, dan tempat tanggal lahir.
- Merekomendasi terkait adanya pemilih yang belum terdaftar dalam data pemilih ke KPU Kabupaten Karanganyar.
- Merencanakan pengawasan dan pencermatan terhadap data pemilih dengan menggunakan alat kerja pengawasan yang ada.
- Berkoordinasi secara periodik dan intensif dengan Disdukcapil Kabupaten Karanganyar selaku stakeholder dalam urusan kependudukan,
- Koordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar terhadap efektivitas penggunaan SIDALIH dalam proses pemutakhiran data pemilih.



Grafik menunjukkan : Prosentase verifikasi pada pemilih lebih besar, guna mengetahui secara langsung pemilih yang sudah terdaftar dan pemilih yang belum masuk dalam data pemilih.

2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

a. Pencegahan

Upaya pencegahan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten dengan membentuk posko pengaduan data pemilih, dengan harapan masyarakat dapat berperan aktif mendaftarkan diri ketika belum terdata dalam daftar pemilih. Selain itu, Bawaslu juga menyebarkan stiker dan pamflet terkait gerakan melindungi hak pilih kepada seluruh masyarakat.

b. Aktivitas Pengawasan

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap seluruh proses Penyusunan Daftar Pemilih meliputi:

- Penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran

Alur Pemutakhiran data pemilih yang diambil dari Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) disinkronkan dengan dengan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 yang ada di KPU Kabupaten Karanganyar. Hasil sinkron data tersebut digunakan sebagai bahan pemutakhiran yang dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di tingkat desa / kelurahan.

- Pembentukan Pantarlih

Proses pembentukan Pantarlih yang istilah tersebut menjadi PPDP dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa / kelurahan. Jumlah PPDP bervariasi antara kelurahan satu dengan yang lain.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan terkait keterlambatan pembentukan Pantarlih / PPDP, PPDP yang berafiliasi pada salah satu partai politik.

- Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di tiap tingkatan jajaran KPU Kabupaten Karanganyar.
- Melakukan pemeliharaan data pemilih yang telah ditetapkan.

- Ketidaklengkapan dan ketidakcocokan Elemen Data pada data pemilih

	KECAMATAN	KETIDAKCOCOKAN DAN KETIDAKLENGKAPAN ELEMEN DATA DALAM DPS
KARANGANYAR	COLOMADU	13
	GONDANGREJO	185
	JATEN	49
	JATYOSO	154
	JENAWI	57
	JUMANTONO	0
	JUMAPOLO	69
	KARANGANYAR	162
	KEBAKKRAMAT	872
	KERJO	361
	MATESIH	25
	MOJOGEDANG	0
	TAWANGMANGU	0
	KARANGPANDAN	85
	TASIKMADU	316
	NGARGOYOSO	13
	JATIPURO	200
JUMLAH		2561

- Adanya data ganda pada penyusunan data pemilih yang dilakukan oleh jajarannya KPU Kabupaten Karanganyar

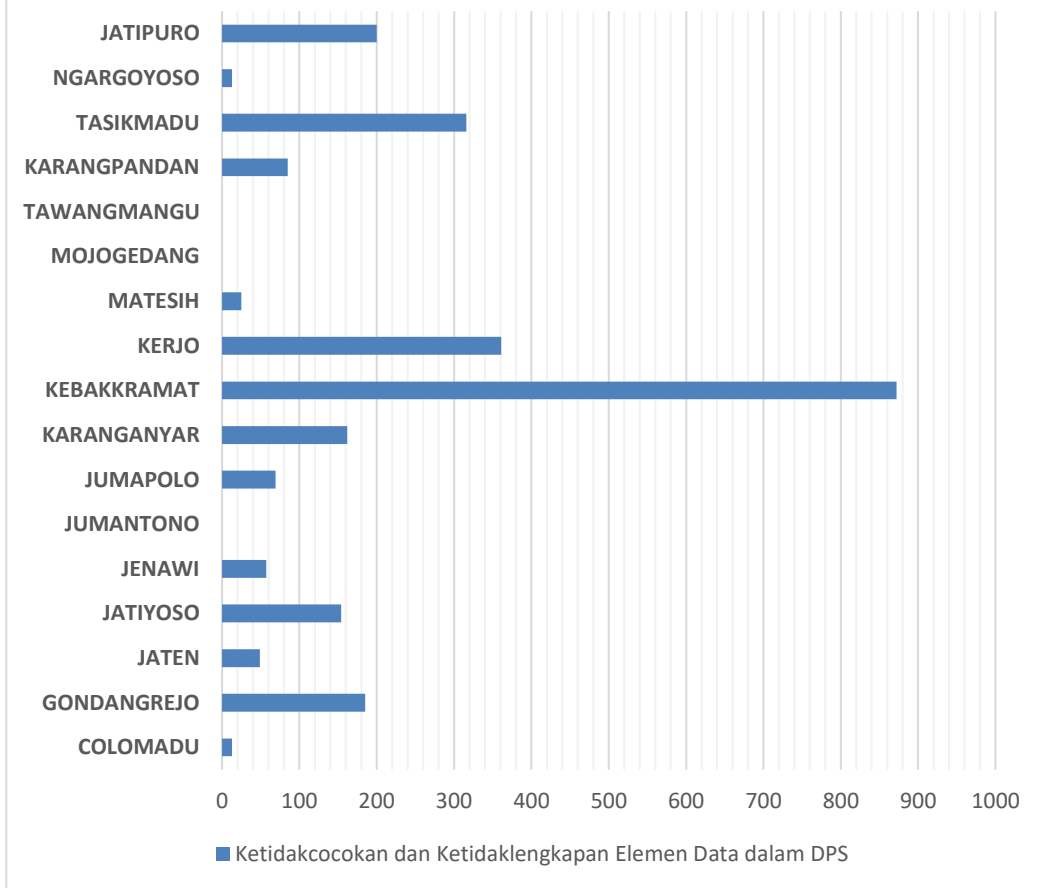
REKAPITULASI DATA GANDA HASIL PENGAWASAN

NO	KECAMATAN	MENINGGAL	PINDAH DOMISILI	GANDA
1	JATIPURO	1	1	2
2	KARANGPANDAN	0	1	2
3	JUMAPOLO	0	1	0
4	TASIKMADU	2	0	6
5	MATESIH	5	2	1
6	KEBAKRAMAT	0	0	5
7	GONDANGREJO	0	0	3
8	JENAWI	0	0	2
9	KERJO	0	0	2
10	TAWANGMANGU	0	0	0
11	JATEN	1	1	5
12	MOJOGEDANG	0	0	2
13	JUMANTONO	1	9	9
14	GONDANGREJO	0	0	3
15	JATİYOSO	0	0	2
16	COLOMADU	0	0	0
17	KARANGANYAR	0	0	8
	JUMLAH	10	15	52

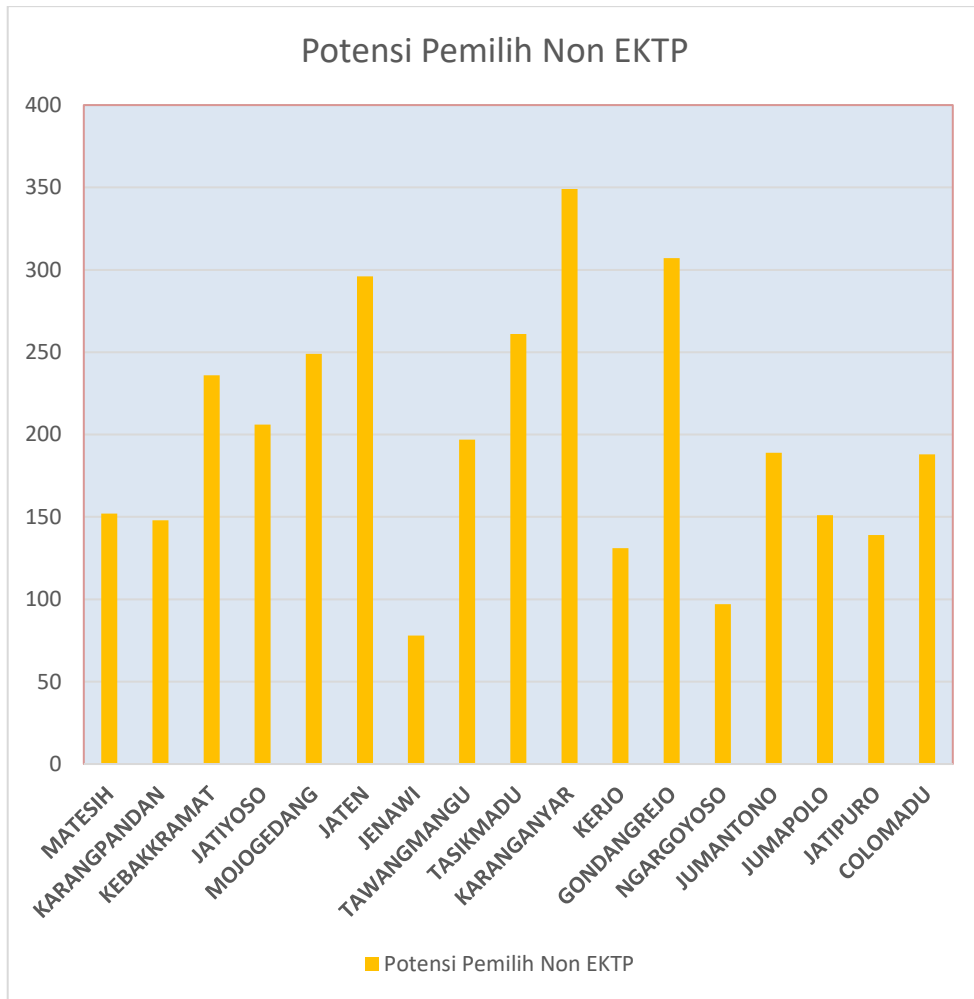
- Potensi pemilih yang belum memiliki E KTP

No.	KECAMATAN	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	MATESIH	173	87	65	152
2	KARANGPANDAN	146	86	62	148
3	KEBAKRAMAT	225	121	115	236
4	JATİYOSO	151	113	93	206
5	MOJOGEDANG	235	132	117	249
6	JATEN	266	162	134	296
7	JENAWI	99	48	30	78
8	TAWANGMANGU	150	100	97	197
9	TASIKMADU	218	139	122	261
10	KARANGANYAR	275	189	160	349
11	KERJO	149	74	57	131
12	GONDANGREJO	256	163	144	307
13	NGARGOYOSO	129	56	41	97
14	JUMANTONO	177	112	77	189
15	JUMAPOLO	148	84	67	151
16	JATIPURO	136	73	66	139
17	COLOMADU	216	109	79	188
TOTAL		3149	1848	1526	3374

Ketidakcocohan dan Ketidaklengkapan Elemen Data dalam DPS



Grafik menjelaskan Ketidakcocohan dan Ketidaklengkapan Data Dalam DPS banyak terjadi di kecamatan Kebakkramat.



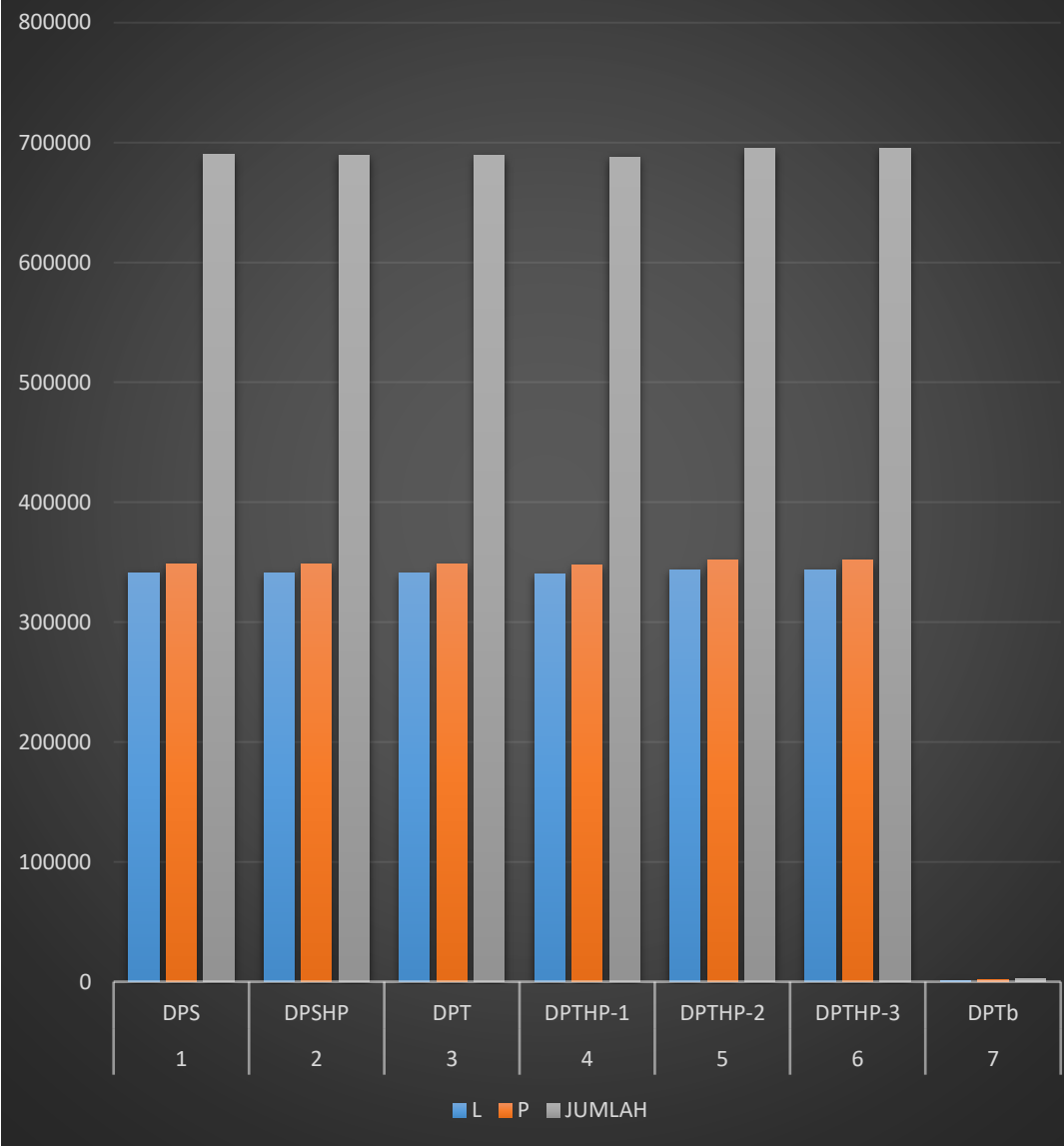
Grafik menunjukkan : Potensi Pemilih Non E KTP justru terjadi di wilayah perkotaan.

Metamorfosis Data Pemilih

Pemilu Tahun 2019

NO	TAHAPAN	JUMLAH DAFTAR PEMILIH		
		L	P	JUMLAH
1	DPS	341053	348787	689840
2	DPSHP	340944	348621	689565
3	DPT	340685	348468	689153
4	DPTHP-1	340105	347717	687822
5	DPTHP-2	343587	351440	695027
6	DPTHP-3	343587	351440	695027
7	DPTb	1056	1342	2398

Metamorfosis Data Pemilih Pemilu Tahun 2019



3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

a. Temuan

- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap penyusunan Daftar Pemilih Sementara (Model A.1-KWK) di temukan sejumlah **2561** pemilih yang bermasalah / ketidakcocokan dan Ketidaklengkapan Elemen Data Dalam DPS.
- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap penyusunan Daftar Pemilih Tetap (Model A.3-KWK) di temukan sejumlah **184** pemilih yang terindikasi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap DPTHP-2 ditemukan Ganda NIK sejumlah **52**.
- Potensi pemilih non E- KTP sejumlah **3374**.

b. Rekomendasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum merekomendasi dengan mengirim surat serta lampiran data yang dimaksud terhadap :

- Akomodasi pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-Elektronik, serta ketidakcocokan dan Ketidaklengkapan Elemen Data
- Entry data pemilih yang terindikasi ganda dalam Data Pemilih.
- Menindaklanjuti adanya pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Atas rekomendasi terkait temuan penyusunan data pemilih tersebut, ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Karanganyar, dengan mengirim surat ke Bawaslu Kabupaten Karanganyar disertai lampiran data yang ditindaklanjuti.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih

Tahapan pemutakhiran daftar pemilih merupakan dinamika yang rentan terhadap akurasi data pemilih, karena daftar pemilih yang ada dalam DP4 bersifat dinamis, setiap saat daftar pemilih mengalami *fluktuasi* (kenaikan). Berbagai cara dan upaya telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk mendapatkan daftar pemilih yang *valid* dan *terverifikasi*, dari mulai pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar

Pemilih (PPDP) yang bertugas melakukan pemutakhiran/*verifikasi faktual* /pencocokan dan penelitian terhadap setiap warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, bahkan wilayah kerja PPDP berbasis RT/RW sehingga petugas PPDP tahu dan faham betul orang per orang yang masuk sebagai pemilih di wilayah kerjanya. Faktor geografis wilayah juga berpengaruh terhadap kegiatan pemutakhiran data pemilih. Lokasi pegunungan dan juga pengkusuran lokasi masyarakat menjadi persoalan dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih.

Sistim Data Pemilih (SIDALIH) belum dapat mengakses data secara sempurna, masih terjadi beberapa kesalahan *entry* data, akibatnya data hasil pemutakhiran yang dilaporkan jajaran KPU Kabupaten Karanganyar dari tingkat PPS – PPK tidak terjadi perubahan yang *signifikan*.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih.

Pengawasan pada tahapan pemutakhiran data sangat rentan dengan *akurasi* data pemilih yang *terverifikasi*. Metode pemutakhiran yang dilaksanakan PPDP tidak sesuai dengan standar operasional yang ada, petugas pemutakhiran hanya mengambil data KK dari kelurahan, dan kemudian data tersebut di *copy paste* dalam daftar pemilih. Untuk pemasangan stiker diserahkan pada masing-masing RT setempat, diberikan ke warga saat adanya pertemuan rutin RT. Pengawas dalam hal ini sulit mendeteksi KK yang sudah terdata atau belum, mengingat semua data KK yang harus didatangi, hanya dimiliki oleh PPDP. Sehingga yang terjadi di lapangan, PPL hanya menerima data hasil pemutakhiran dari PPDP saja, tanpa mempunyai data pembandingan dalam kegiatan tersebut. Adanya perubahan data pemilih pada kegiatan rekapitulasi data pemilih di tiap tingkatan sering tidak disampaikan ke jajaran pengawas.